

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh :

JULIANA. J

NIM. E43011004

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email : juliana260292@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu" penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program BLSM di Desa Tekalong belum terlaksana dengan baik. Adapun Skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi didalam implementasi program BLSM di Desa Tekalong yang antara lain, banyak masyarakat miskin yang tidak terdata dalam penerima bantuan uang tunai dan jadwal pendistribusian BLSM yang sering mengalami keterlambatan. kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kurang maksimalnya implementasi program BLSM di Desa Tekalong dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Faktor tersebut antara lain. Faktor yang pertama, kurangnya komunikasi berupa kurang diadakannya sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai BLSM sangat minim sekali. Kedua, faktor sumber daya dalam hal ini kurang memadainya fasilitas didalam implementasi program BLSM dirasakan sangat mempengaruhi didalam implementasi program BLSM di Desa Tekalong. Ketiga, sikap implementor yang dirasakan sangat kurang mendukung didalam implementasi program BLSM menyebabkan program BLSM di Desa Tekalong tidak berjalan dengan optimal. Keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak menyebabkan implementasi program BLSM membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya.

Kata-kata kunci: implementasi, program, BLSM, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi

Abstract

This thesis entitled the cash transfers programme in Tekalong village in Mentebah subdistrict of Kapuas Hulu regency. This thesis was aimed to describe and analyse the cash transfers programme was not yet materialized well. Moreover, the case that occurred in the implementation of the programme such as poor societies were not in the list of the data programme and the schedule of data distribution was often on delay. In short, the result of this research is that the cash transfers programme is not fully implemented in Tekalong village because some factors. First, the society get less communication or socialization about the cash transfers programme. Second, there are insufficiencies of the resources to support the programme. Third, the disposition of implementor does not make any effort to realize the programme optimally. Fourth, the structure bureaucracy engages many sides that effects the implementation of the programme needs long time in the process.

Keywords : Implementation, Programme, Cash transfers, communication, resource, disposition and the structure bureaucracy.

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Selanjutnya program kesejahteraan rakyat bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusakan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan melainkan juga untuk mengatasi dan memerangi kemiskinan.

Akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional yang tentu pula mempengaruhi harga BBM dalam negeri sejak awal tahun 2005, kemudian mempengaruhi juga kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari (sembako), yang kemudian memperlemah daya beli masyarakat, maka lahirlah instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 12 tahun 2005, tentang Bantuan Tunai kepada masyarakat miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 yang kemudian

diperbaharui dengan instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung sementara Masyarakat (BLSM) untuk rumah tangga sasaran. Dimana pembahasan lebih lanjut pada taraf pelaksanaannya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Menteri pada tanggal 16 september 2005, yang memandang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah dilaksanakan.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 2005, dan berlanjut pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2013 diubah nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Karena dianggap gagal oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, fungsi dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu bertujuan untuk membantu beban masyarakat miskin. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau biasa dikenal dengan (BLSM) yaitu upaya pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis ketahui tentang program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di

Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat miskin yang seharusnya penerima bantuan langsung sementara masyarakat tetapi tidak mendapatkan bantuan.
2. Masih ada masyarakat yang menerima bantuan langsung sementara masyarakat yang seharusnya bukan masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah penulis paparkan, maka fokus penelitian ini ialah membatasi pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Tekalong.

Sebagai dasar untuk meneliti maka perlu membuat suatu perumusan masalah yang dipaparkan diatas maka penulis ingin merumuskan masalah yang akan dikaji melalui suatu penelitian dengan melihat persoalan pada: faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Tekalong.

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian di suatu tempat yang dilakukan. Tujuan

penelitian terkait dengan rumusan permasalahan penelitian yang telah disusun oleh peneliti itu sendiri. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terwujudnya pelaksanaan suatu program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang optimal dan tepat sasaran.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan yang terkait dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta dapat menjadi salah satu referensi penelitian yang sejenis untuk menambah kepustakaan.

Manfaat praktis, setidaknya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan pelaksanaan pendistribusian BLSM bagi masyarakat miskin yang dijadikan pedoman umum dalam pelaksanaan penyaluran BLSM khususnya di Desa Tekalong dapat mengetahui betapa pentingnya BLSM dalam kehidupan masyarakat miskin guna mensejahterakan masyarakat miskin.

B. KAJIAN PUSTAKA

Thomas Dye (dalam Subarsono, 2006:2) mengatakan bahwa kebijakan publik

adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever governments choose to do or not to do*). Dimaksudkan Dye dalam pernyataannya diatas adalah bahwa pemerintah dapat membuat pilihan akan keputusannya dalam menggapai suatu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

W.I Jenkins (dalam Wahab, 2012: 15) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Pada definisi Jenkins (dalam Wahab 2005:15) dan Anderson (dalam Subarsono, 2006:2) sama-sama menyatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Pada definisi tersebut ditetapkan bahwa yang menjadi aktor pembuatan kebijakan publik adalah badan-badan dan aparat pemerintah yang ada pada tingkat pusat hingga desa.

Ada beberapa elemen yang termasuk dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson (dalam

Widodo, 2008:14) yang antara lain mencakup beberapa hal berikut:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan public bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan public (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Tachjan (2008:19) menyatakan bahwa kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Adapun lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu “isu” (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi para pelaku kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, efektifitas suatu

kebijakan publik akan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, kebijakan publiknya itu sendiri (level dan isi), lingkungan kebijakan.

Leo Agustino (2008:8) juga menyampaikan bahwa ada beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan yang tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. publik merupakan apa yang Kebijakan sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdangangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan pada pengusaha

membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundangan-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.

4. Kebijakan publik dapat bersifat positif dan negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu kebijakan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Young dan Quinn (dalam Suharto 2008:44) juga menyampaikan beberapa

konsep dan kunci dalam kebijakan publik untuk lebih mudah memahami definisi kebijakan publik yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosiallah dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada

dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Chandler dan Plato (dalam Pasolong 2010:38) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masah publik atau pemerintahan. Kemudian menurut Dunn (dalam Pasolong 2010:39) “ kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yaqng dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan.

Kebijakan publik juga didefinisikan sebagai “ *What governments say and do, or do not. It is the goals or purposes of governments programs.*” Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik.

Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program.

Suatu kebijakan yang telah lahir selanjutnya akan diimplementasikan guna melihat sejauh mana kebijakan yang sudah dibuat tersebut mampu menjawab permasalahan yang ada dikalangan masyarakat, implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi penting untuk dilakukan untuk melihat dampak apa yang dihasilkan dari suatu kebijakan untuk pencapaian suatu tujuan.

Menurut Dunn (2003:22) proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dari tahap-tahap tersebut, penelitian penulis lebih mengarah kepada tahap implementasi kebijakan.

Setelah tahap formulasi kebijakan dilakukan maka tahap selanjutnya adalah tahap implementasi kebijakan. Setiap kebijakan yang telah disahkan harus diimplementasikan oleh aparat pemerintah. Sehingga seharusnya kebijakan yang telah disahkan merupakan kebijakan yang telah

diramalkan kedepannya sebagai solusi bagi masalah yang timbul.

Implementasi merupakan tahap yang menentukan, karena pada tahap inilah sebuah kebijakan dapat ditentukan berhasil atau tidak, apabila pada tahap implementasi ini tidak optimal bahkan terjadi penyimpangan maka dapat dikatakan kebijakan tersebut gagal. Senada dengan pernyataan tersebut, Awang (2010:31) berpandangan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang akan dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” bila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar kebijakan publik yang dimaksudkan benar-benar berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn menyatakan implelementasi adalah” tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006: 65). Sedangkan, menurut Erwan dan Dyah (2010:21) mendefinisikan implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Lebih jelas lagi Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab, 2005:68) merumuskan proses implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbantuan pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan(instansi)

pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai persepsi oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Menerut pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel:

1. komunikasi
keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*targer group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumberdaya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi imlementor, dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemantor, seperti komitmen, kejujuran, demokratis. Apakah implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakn dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.ketika implemantor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan membuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas implementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar(*standard operating procedures*

atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Menurut utaian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi merupakan tahap yang penting. Proses implementasi dari kebijakan akan menentukan keberhasilan dari kebijakan itu sendiri, apakah dari kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah atau justru menambah masalah. Implementasi kebijakan juga bergantung kepada implementor sebagai pelaksana kebijakan yang akan diimplementasikan.

Pertanyaan Penelitian

Besdasarka perumusan permasalahan diatas maka penulis akan membuat pertanyaan penelitian untuk membantu dalam proses penelitian diantaranya:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi BLSM yang dilakukan kepada antar implementor kebijakan sebagai pelaksana kebijakan serta komunikasi implementor dengan masyarakat sebagai sasaran program bantuan BLSM akan mencapai sasaran yang optimal pada masyarakat?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya di Desa Tekalong dalam implementasi program bantuan BLSM, dapat

memperlancar penyaluran program BLSM di masyarakat Desa?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya penulis mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural. Penelitian jenis deksriptif dianggap yang paling tepat untuk penelitian ini karena untuk melihat fenomena apa saja yang telah dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara keseluruhan (dalam Sugiyono, 2010:1). Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Alasan penelitian melakukan penelitian ini di Desa Tekalong karena di Desa ini memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti, selain itu melihat fenomena yang terjadi dalam proses menerima program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak tepat sasaran.

D. HASIL PENELITIAN

a. Komunikasi

Faktor pertama yang berpengaruh menurut Edward III adalah faktor komunikasi. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait dengan sosialisasi tentang BLSM. FB (44) menyatakan bahwa:

Untuk sosialisasi program BLSM di Desa Tekalong saya akui memang sangat kurang sekali pelaksana sosialisasi. Kurangnya dari pihak implementor didalam pelaksanaan sosialisasi membuat kami pihak desa tidak melakukan sosialisasi BLSM sebab masalah sosialisasi bukan merupakan tanggung jawab kami, kami pihak desa hanya sebagai

penyalur bantuan ke warga yang menerima bantuan di desa ini.

Hal serupa juga diutarakan oleh YS (52) salah satu warga miskin yang tidak memperoleh jatah BLSM, mengatakan bahwa:

Setahu saya sampai sekarang ndak pernah ada sosialisasi mengenai BLSM kepada warga, segala papan pengumuman di jalan-jalan pun ndak pernah saya liat, makanya saya ndak tau menau tentang adanya BLSM. Jadi susah bagi saya warga miskin ni kebagi bantuan dari pemerintah, saya tidak tau menau bagaimana pengurusan BLSM dan apa-apa saja syarat agar mendapatkan bantuan berupa uang tunai.

Terkait pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan program BLSM Desa Tekalong, BS (33) nyatakan bahwa:

Program BLSM ini adalah program dari pemerintah yang diawali dari pemerintah pusat untuk masyarakat miskin di seluruh Indonesia turun ke Provinsi kemudian ke Kabupaten setelah itu turun ke Kecamatan dan terakhir ke kelurahan/desa. Pihak desa hanya membagikan uang sesuai data yang ada. Kami hanya menjadi

perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten untuk membagikan bantuan berupa uang tunai kepada warga yang berhak menerima bantuan. Saya akui program BLSM di Desa Tekalong belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang seharusnya menerima bantuan masih banyak yang tidak mendapatkannya. Data mengenai RTS yang berhak menerima bantuan seringkali jauh jumlahnya dengan kenyataan yang sebenarnya. Data tersebut kecamatan yang bekerja sama dengan BPS dalam pendataan. Kami pihak desa sudah melakukan upaya berkomunikasi dengan pihak kecamatan yang mendistribusikan bantuan agar data penerima bantuan di data ulang kembali dikarenakan masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, tapi sampai saat ini belum ada pihak BPS untuk melakukan pendataan ulang.

Selain itu pernyataan mengenai implementasi BLSM di Desa Tekalong juga di sampaikan MG (66), beliau mengatakan:

Kalau berbicara mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Tekalong masih jauh lah

dikatakan berhasil dan tepat tujuannya. Saya jak yang udah tua ndak mampu agik mauk kerja buat makan sehari-hari jak susah, rumah atapnya bocor-bocor tak mendapatkan bantuan . kalau macam gini buat apalah program nih dibuat, setahu saya BLSM adalah bantuan

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sanga penting dalam proses implementasi. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf. Keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan BLSM di Desa Tekalong LG (57)mengatakan:

Dalam impelemntasi program BLSM mengalami kesulitan didalam hal penyedian tempat. Bantuan uang berupa uang tunai yang datang

untuk masyarakat miskin. Tapi kalau pelaksanaannya masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan lebih baik program ini diganti saja dengan program laindari pada nimbulkan masalah.

b. Sumber Daya

biasanya kami titipkan ke rumah pak kades sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima bantuan hal ini dikarenakan menyangkut uang warga maka takut terjadi satu dan dua hal yang tidak diinginkan makan kami bersepakat untuk disimpan terlebih dahulu dikediaman pak kades.

Hal serupa juga diutarakan oleh HS (38) yang mengatakan:

Dalam pelaksanaannya implementor mengalami kendala didalam penyedian fasilitas berupa tempat dalam hal ini rumah pak kades sebagai tempat pengambilan bantuan yang baru di distribusikan oleh pemerintah daerah ke desa.

Hasil wawancara peneliti, terkait dengan jumlah masyarakat yang berhak menerima bantuan di dalam pelaksanaan program BLSM di Desa Tekalong

Kecamatan Mentebah, TA (40) mengatakan bahwa:

Kalau di ikutkan data susah, menurut data yang saya tahu dari pihak desa hanya ada 135 RTS yang berhak dapat bantuan. Tapi kenyataannya dilapangan masih banyak warga yang belum dapat bantuan. Tidak jarang orang mau kelahi gara-gara tak dapat bantuan. Kalau di RT saya orang sering menyalahkan saya sebagai ketua RT karna yang seharusnya dapat bantuan malah tak dapat bantuan justru orang yang ada usaha sehari-hari dapat bantuan.

c. Disposisi

Edward III (dalam Subarsono, 2010:91) menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan kqarakteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut dapat berupa komotmen, kejujuran beserta sifat demokratis. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya apabila sikap atau perspektif yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan pembuat

kebijan maka proses implementasi tidak dapat terlaksan efektif.

Implementor yang menguasai substansi kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam beberapa hal, protes masyarakat masih terus bermunculan dalam proses pelaksanaan implementasi, salah satunya adalah mengenai waktu dan pendataan.

hal ini diungkapkan dari pernyataan GS (49), yakni:

masyarakat yang tidak mendapatkan BLSM tetapi berhak mendapatkan BLSM protes ke kantor Desa mengenai mangapa dia tidak terdata. Pihak desa yang disalahkan, malah biasa nuduh kita korupsi lah. Padahal masalah pendataan penduduk miskin penerima BLSM itu tanggung jawabnya ada pemerintah sosial yang bekerjasama dengan BPS dalam pendataan penduduk. Kami pihak desa hanya mengawasi pelaksanaan BLSM di desa kami petugas BLSM yang membagikan dana bantuan ke warga sesuai dengan data yang ada. Masalah lain pun kadang sering terjadi keterlambatan pendistribusian dana ke desa disebabkan kendala yang kami juga kurang tau penyebabnya,

jadi dalam pelaksanaannya di lapangan masyarakat ada yang marah-marah mengenai keterlambatan.

Berbagai protes masyarakat dalam pendataan yang tidak maksimal tidak menampakkan tanggapan dari petugas pendataan. Dalam pelaksanaan implementasi program BLSM, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak sepenuhnya terlaksana.

Sebagaimana yang diungkapkan SN (41), beliau mengatakan:

3 bulan yang lalu saya memprotes kepada pihak yang membagikan dana bantuan miskin, kenapa saya tidak memperoleh jatah, jawabnya dari pihak desa nama kami tidak terdata dalam warga yang menerima bantuan saya meminta agar kedepannya saya bisa terdata sebagai penerima bantuan. Tetapi sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan bantuan.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu

kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi mengani standar prosedur operasi (SOP). Pelaksanaan implementasi kebijakan dengan organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebat) dapat menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga diperlukannya koordinasi yang intensif.

Sebagaimana yang diungkapkan MA (39) mengenai SOP dalam penyaluran BLSM . beliau mengatakan:

Dalam pelaksanaan program BLSM di Desa Tekalong kami selalu mengikuti SOP (Standar Operasi Prosedur) dalam membagikan bantuan. SOP mengenai bantuan BLSM sudah tercantum pada buku pedoman tentang BLSM yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk itu kami selalu bekerja sesuai SOP yang ada sesuai dengan jumlah uang yang ada untuk dibagikan kepada RTS.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam Bab IV, maka dalam subbab ini peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor tersebut dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyebutkan ada empat (4) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, empat faktor tersebut diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik akan dipaparkan lebih rinci oleh peneliti sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh implementor ternyata masih kurang efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan masyarakat yang sebagian besar menyatakan masih kurangnya sosialisasi mengenai program BLSM. Pihak implementor menyebutkan bahwa kurang memadainya sarana sosialisasi menyebabkan terlambatnya proses transmisi kebijakan secara jelas terutama

kepada sasaran kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Minimnya perhatian terhadap penyelenggaraan sosialisasi kebijakan secara efektif mempengaruhi penyampaian substansi kebijakan secara jelas kepada semua pihak, jika sosialisasi kurang efektif maka proses penyampaian substansi kebijakan tidak dapat tercapai sehingga apa yang sebenarnya diharapkan dari kebijakan tidak dapat terealisasi pula secara efektif.

2. Sumber daya dalam hal ini sarana dan prasarana dalam implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat dirasakan kurang menunjang dalam proses implementasi. Ketersediaan fasilitas yang tidak memadai tentunya pada akhirnya menghambat proses implementasi serta menimbulkan disposisi implementor yang kurang baik pula.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo.2006. *Dasar-Dasar KebijakanPublik*, Alfabeta: Bandung.
- Awang, Azam.2009. *Implementasi Pemberdayaan Dasar*. Jakarta: Pustaka Belajar

Dunn, William. N. 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.

Gerungan, W.A.2000. *Psycologi Social*. PT Eresco Bandung_Jakarta.

Grindle, Merilee S. (1980), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, Chapter 1.

Meolong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nugroho, D. Raint. 2006. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Purwanto, Erwan Agus, Sulistyastuti.201. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gava Media.

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dab Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung.

Tahir, Arifin.2010. *Kebijakan Publik dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Penerbit PT. Pustaka Indonesia Press: Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan.Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Juliana J
NIM / Periode lulus : 643011004 / Periode I
Tanggal Lulus : 7 September 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
E-mail address/ HP : Juliana.260292@gmail.com / 08575070030

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Governance* (*) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Ditandatangani S. IP, M. Si
NIP. 198306272006642020

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 17 April 2017

Juliana J
NIM. 643011004

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)